

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP PANGKALAN PSDKP BATAM

Nomor SOP	: B.3036 / PSDKPLan.2/0T.310/1X/202
Tgl Pembuatan	: 02 September 2024
Tgl Efektif	NOT MALE
Tgl Pengesahan	: ONENTERIAN KG
Disahkan oleh	: Kepala Pangkalan PSDKP Batam
	The state of the s

Turman Hardianto Maha, S.P. MMP NIR 197111231999031001

Nama SOP : Uji Konsekuensi SDKP

Ū		ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi		
Т	2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan		
L	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-	3	Mempunyai communication skill		
Т		KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan				
Т	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-	4	Kemampuan pendokumentasian informasi		
Т		KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur				
	5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014					
		tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan				
	6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				
L						
	′	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik				
K	Keterkaitan		Perala	atan/Perlengkapan		
	1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK		
	2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet		
	3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi				
P	Peringatan			Pencatatan dan Pendataan		
			1	Buku Tamu/Agenda		
			2	Daftar pemohon		
L						

4	4	ယ	N	_	No.
Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP	Kegiatan
		dito ak			PPID Kementerian /PPID Unit Kerja Eselon
	diterima	ak k			Pelaksana PPID Sekretariat Kementerian PPID Bidang /PPID Unit Uji Kerja Eselon Konsekuensi
					Atasan PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon
Konsep SK	Konsep SK	dokumen informasi publik, peraturan perUUan	konsep kajian	dokumen informasi publik, peraturan perUUan	Kelengkapan
1 hari	14 hari	1 hari	1 hari	3 hari	Mutu Baku Waktu
Keputusan Atasan PPID	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	surat penolakan	rekomendasi	konsep kajian	Output
	Dapat berupa Keputusan PPID				Keterangan